

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

Dalam penelitian tentang pembangunan perpustakaan masyarakat dengan partisipasi masyarakat di Kampung Gunung Batu Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Jawa Barat, ada tiga unsur terkait yang harus diperjelas pengertiannya menggunakan konsep pembangunan perpustakaan masyarakat yang terkait dengan partisipasi masyarakat dan masyarakat. Tiga pengertian konseptual tersebut merupakan kerangka yang membangun penelitian ini secara utuh.

Pengertian konseptual digunakan untuk dapat memperjelas batas atau ciri dari fenomena, yang memberi perhatian sedemikian rupa sehingga fenomena tersebut dapat dibedakan dari fenomena lainnya, dan dapat ditelaah secara khusus sekaligus secara berkaitan (Putu Laxman Pendit, 2006). Selanjutnya, pembangunan perpustakaan masyarakat dengan partisipasi masyarakat dan pengertian masyarakat dijelaskan merujuk atau mengaitkannya antara yang satu dengan yang lain.

2.1 Pembangunan Perpustakaan Masyarakat

2.1.1 Perpustakaan Masyarakat

Sebagai awal penjelasan yaitu perpustakaan masyarakat, Sutarno NS (2006: 18-20) menjabarkan pengertian perpustakaan masyarakat sebagai berikut:

- (a) Perpustakaan adalah milik masyarakat, maksudnya bahwa perpustakaan dibangun dan dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan yang berada di sekitarnya dan memanfaatkan perpustakaan.
- (b) Perpustakaan masyarakat tersebut untuk masyarakat, untuk melayani kepentingan penduduk yang tinggal di sekitarnya misalnya perpustakaan umum. Pengertian umum adalah bahwa warga masyarakat yang berdomisili di wilayah perpustakaan terdiri atas semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, adat-istiadat, tingkat pendidikan, umur, dan lain sebagainya. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan perpustakaan umum

tersebut (demokrasi informasi). Mereka juga mempunyai kewajiban untuk bersama-sama memelihara dan mengembangkan. Hal itu dilandasi suatu konsep bahwa sebuah perpustakaan umum adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat.

- (c) Perpustakaan tersebut menjadi tanggung jawab, wewenang, dan hak masyarakat setempat dalam membangun, mengelola, dan mengembangkannya. Dalam hal itu perlu dikembangkan rasa untuk ikut memiliki, ikut bertanggung jawab, dan ikut memelihara. Masyarakat yang menaruh perhatian dan kepedulian terhadap perpustakaan adalah mereka yang menyadari dan menghayati bahwa perpustakaan bukan saja penting, tetapi sangat diperlukan oleh masyarakat.

Jadi, pengertian tentang perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang dimiliki masyarakat. Keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat adalah atas kehendak, keinginan, dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu kebutuhan dan kehidupan mereka sehari-hari dalam bidang informasi.

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa “antara perpustakaan dan masyarakat terdapat hubungan kausal, yakni hubungan sebab dan akibat. Artinya, adanya perpustakaan karena ada masyarakat yang membutuhkan, dan keberadaan perpustakaan adalah untuk melayani masyarakat” (Sutarno NS, 2006: 159).

Keberadaan sebuah perpustakaan di dalam suatu komunitas masyarakat karena hal-hal sebagai berikut: *pertama*, adanya keinginan yang datang dari kalangan masyarakat luas untuk terselenggaranya perpustakaan, karena mereka yang membutuhkan; *kedua*, adanya keinginan dari suatu organisasi, lembaga, atau pemimpin selaku penanggungjawab institusi di suatu wilayah untuk membangun perpustakaan; *ketiga*, adanya kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu tentang pentingnya sebuah perpustakaan; *keempat*, diperlukannya wadah atau tempat yang bisa untuk menampung, mengolah, memelihara dan memberdayakan berbagai hasil karya umat manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan, sejarah penemuan, budaya dan lain sebagainya (Sutarno NS, 2006: 67).

Pembangunan perpustakaan dan berbagai koleksi bahan pustaka, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya dimaksudkan untuk menunjang proses

peningkatan kecerdasan masyarakat. Kecerdasan itu meliputi kecerdasan intelektual, spiritual, personal, dan kecerdasan sosial. Peranan yang paling mendasar bukan saja bagaimana perpustakaan berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui (*how to know*) akan tetapi lebih pada bagaimana belajar (*how to learn*) tentang hal-hal yang ingin dikuasai, dialami dan dihayati oleh seseorang/masyarakat (Sutarno NS, 2006: 160).

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang didirikan oleh dan untuk masyarakat. Untuk itu sudah sepantasnya apabila masyarakat juga berpartisipasi dalam pengembangan perpustakaan. Dengan partisipasi ini, masyarakat diharapkan akan memiliki perpustakaan yang mampu menjadi sarana belajar. Sebagai sarana belajar, perpustakaan masyarakat menduduki peran strategis untuk mendidik dan memperluas akses informasi melalui jalur non formal. Hal ini dapat dijadikan motor penggerak terwujudnya masyarakat baca, selain itu juga dapat menjadi agen budaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki sikap kritis karena memiliki wawasan luas, meningkatnya apresiasi terhadap budaya dan lingkungan, keterampilan bekerja sehingga dapat mandiri, dan mendorong sikap yang semakin cerdas baik emosi maupun intelektualnya (Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Bandung, 2008).

Untuk memperkuat konsep perpustakaan masyarakat, maka perlu juga dijabarkan penjelasan tentang perpustakaan umum. Penjelasan itu antara lain tentang perpustakaan umum 'sebagaimana adanya' dan konsep perpustakaan umum 'sebagaimana harusnya'. Penjelasan ini diharapkan dapat memperkaya konsep pembangunan perpustakaan masyarakat sehingga dapat pula memberi batas yang jelas antara konsep pembangunan yang dimaksud dengan konsep pembangunan pada jenis perpustakaan lainnya.

Melihat perpustakaan umum 'sebagaimana adanya', maka kita perlu melihat bagaimana selama ini pembangunan dan pendayagunaan perpustakaan umum. Soal pembangunan perpustakaan umum, Blasius Sudarsono (2006: 157) secara skeptik mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

“Awal program pembangunan perpustakaan umum paska kemerdekaan RI terjadi pada dasawarsa 1950-an, tepatnya pada bulan April tahun 1953, bersamaan dengan didatangkannya konsultan Unesco dari Selandia Baru, yaitu Mr. A.W.G. Dunningham (*Williamson, 1999*). Pada waktu itu dapat dikatakan bahwa hanya 10% masyarakat kita yang telah bebas buta huruf.

Angka ini diperkirakan, karena pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia sering disebut bahwa masyarakat masih 90% buta huruf. Pendekatan pembangunan perpustakaan dengan konsultan asing itu dapat diduga menggunakan pola pikir masyarakat barat yang sudah memiliki kebiasaan membaca dengan baik. Dengan demikian dapat dipertanyakan apakah perpustakaan yang dibangun pada waktu itu ditujukan juga untuk 90% masyarakat yang masih buta huruf atau hanya untuk 10 % masyarakat melek huruf.”

Apa yang terjadi selanjutnya adalah “banyak orang yang menganggap bahwa perpustakaan lebih banyak dikunjungi oleh mereka yang merasa butuh ilmu pengetahuan terutama pelajar dan mahasiswa serta dosen atau peneliti” (Agus Rusmana, 1996: 162). Anggapan semacam ini dapat berarti bahwa banyak masyarakat yang merasa perpustakaan umum bukanlah miliknya melainkan milik segolongan masyarakat tertentu. Blasius (2006: 158) menyatakan “dapat diduga bahwa semua jenis perpustakaan yang saat ini kita kembangkan dan kelola nampaknya terjerumus hanya berguna bagi golongan elite.”

Terkait dengan dugaan tersebut, Anuar (1981: 80) menjelaskan bahwa pada masyarakat yang dikatakan sebagai buta huruf kemungkinan akan sangat kecil untuk mengunjungi perpustakaan umum karena banyak di antara mereka yang beranggapan perpustakaan umum tidak memiliki koleksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau yang dapat mereka gunakan. Demikian pula dengan orang yang dikategorikan tidak mampu tidak dapat menyediakan waktu dan biaya untuk bergabung dengan perpustakaan. Perpustakaan umum yang ada masih banyak yang mengandalkan sumber pendanaannya pada iuran anggota serta dari dana pemerintah daerah. Lebih lanjut, Anuar pada dasarnya melihat sistem perpustakaan umum di beberapa negara berkembang telah dikembangkan dengan cukup baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perpustakaan yang ada memiliki kecenderungan untuk melayani hanya pada kelompok masyarakat elit, yaitu masyarakat yang berpendidikan tinggi dimana kelompok masyarakat ini juga memiliki kemudahan dalam mengakses jenis perpustakaan lainnya.

Sebagai tanggapan atas kenyataan tersebut, di Indonesia kemudian berkembang apa yang kita sebut perpustakaan masyarakat atau perpustakaan komunitas dengan penamaan yang beragam, seperti Taman Bacaan, Rumah Baca, Sanggar Baca, Saung Baca, dan lain-lain. Penamaan Taman Bacaan yang

kemudian berkembang selanjutnya mendapat kritik dari Putu Laxman Pendit (2008) (dalam Haklev, 2008: 40):

“Lalu mengapa LSM dan pembela rakyat kecil yang sekarang bermunculan seperti jamur di musim hujan itu, gemar menggunakan kata “Taman Bacaan” di dalam proposal-proposal mereka, sepanjang sudah ada kata yang pas, tidak rumit, bermakna tunggal, dan berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas: PERPUSTAKAAN.”

Taman Bacaan Masyarakat sebagai perpustakaan komunitas merupakan “perpustakaan yang diciptakan, dipelihara, digunakan dan dikembangkan bersama secara partisipatif bersama dengan komunitas masyarakat. Prinsip pengelolaannya adalah *“the right material for the right users at the right time”*. Dengan misi utamanya adalah dalam rangka pendidikan, akses informasi rekreasi, dan kebudayaan” (Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Bandung, 2008). Soal keberadaan perpustakaan komunitas ini, Evershed (2007) menjelaskan bahwa perpustakaan komunitas pada umumnya berada pada daerah yang mayoritas penduduknya masih memiliki keterbatasan dalam mengakses literatur, buku, dan media pembelajaran lainnya. Perpustakaan komunitas didirikan dan berkembang dengan bersandar pada partisipasi dan kesukarelaan masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut, Evershed menguraikan ciri-ciri utama dari perpustakaan komunitas sebagai berikut:

- (a) Memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dengan menyediakan koleksi yang ditujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat.
- (b) Sederhana, karena didirikan oleh masyarakat sendiri dan memiliki ruangan yang terbatas.
- (c) Perpustakaan diselenggarakan oleh penduduk lokal.
- (d) Pengelolaannya bersandar pada kesukarelaan dari para relawan sesuai dengan sifat perpustakaan komunitas sendiri sebagai lembaga non profit.
- (e) Memiliki strategi gender yang dalam pengelolaannya melibatkan perempuan dan juga memberikan fasilitas bagi aktifitas perempuan.
- (f) Memiliki jaringan di antara perpustakaan komunitas untuk saling berbagi informasi, strategi, ide, dan sumber daya melalui suatu cara tertentu.

Dari ciri-cirinya itu, perpustakaan komunitas diselenggarakan terutama bagi diri komunitas itu sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam upaya memberdayakan dirinya. Dimulai dengan mendekatkan diri mereka pada kegiatan membaca dan menulis. Pendekatan dalam pembangunan perpustakaan yang dilakukan oleh masyarakat atau komunitas itu tidak lagi dilakukan secara struktural dan birokratis melainkan melalui pendekatan kultural yang cair. Pengelolaan perpustakaan komunitas lebih bersifat independen, dalam arti tidak bergantung pada pemerintah, terutama pada masa awal keberadaannya dengan slogan dan semangat: *DO-IT-YOURSELF*¹ (Haklev, 2008).

Sedikit penjelasan itu adalah gambaran perkembangan perpustakaan umum sebagaimana adanya. Selanjutnya, tentang 'sebagaimana harusnya' perpustakaan umum dapat kita rujuk pada apa yang dikenal dengan *Public Library Manifesto* yang dikeluarkan oleh Unesco dan IFLA (*International Federation of Library Association*) pada tahun 1994. Secara singkat pokok-pokok manifesto (dalam Blasius, 2006) akan dijabarkan di bawah ini.

Manifesto ini bertolak dari nilai dasar kemanusiaan yaitu kemerdekaan, kesejahteraan, dan pembangunan masyarakat maupun perorangan. Semua nilai itu hanya akan terwujud melalui tingkat kemampuan warga yang sadar informasi untuk melaksanakan hak demokrasi dan memainkan peran aktifnya dalam masyarakat. Partisipasi konstruktif dan upaya pembangunan demokrasi sangat tergantung pada cukupnya pendidikan dan juga pada kemerdekaan akses yang tak terbatas pada pengetahuan, pemikiran, budaya dan informasi.

Perpustakaan umum merupakan gerbang menuju pengetahuan, menyediakan kondisi awal bagi perorangan maupun kelompok sosial untuk melakukan kegiatan belajar seumur hidup, pengambilan keputusan mandiri, dan pembangunan budaya. Manifesto ini menyatakan kepercayaan kepada perpustakaan umum sebagai kekuatan hidup bagi pendidikan, kebudayaan dan informasi, serta sebagai lembaga utama untuk membina kedamaian dan

¹ Do It Yourself pada dasarnya adalah prinsip yang dianut oleh kebanyakan komunitas *punk*, khususnya *punk anarki*. Prinsip yang mengajukan kepentingan inisiatif individu dengan mengedepankan budaya perlawanan. Soal keberadaan perpustakaan komunitas ataupun Taman Bacaan dengan semangat ini dapat dibaca lebih lanjut pada tesis yang ditulis oleh Stian Haklev: *Mencerdaskan Bangsa – An Inquiry into the Phenomenon of Taman Bacaan In Indonesia*, University of Toronto, 2008.

kesejahteraan spiritual melalui akal budi manusia. Oleh karena itu, Unesco mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perpustakaan umum.

Pada prinsipnya, perpustakaan umum adalah pusat informasi yang menyediakan beragam pengetahuan dan informasi bagi penggunanya. Layanan diberikan dengan dasar kesamaan akses bagi setiap orang tanpa membedakan umur, ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, bahasa maupun status sosial. Layanan khusus harus disediakan bagi mereka yang mengalami hambatan seperti bahasa minoritas, penyandang cacat, pasien rumah sakit maupun narapidana. Semua kelompok pengguna harus mendapatkan materi sesuai dengan kebutuhannya. Koleksi dan layanan harus mencakup semua jenis media dan teknologi, maupun materi tradisional. Yang sangat diperlukan adalah materi bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Materi harus mencerminkan arah perkembangan dan evolusi yang terjadi di masyarakat, demikian juga dengan rekaman atas pemikiran dan imajinasi manusia. Koleksi dan layanan harus bebas dari sensor politik, agama, atau tekanan komersial.

Misi perpustakaan umum yang berhubungan dengan literasi, pendidikan, dan kebudayaan dalam layanannya menciptakan dan menguatkan kebiasaan membaca sejak usia dini; mendukung pelaksanaan bagi pendidikan formal maupun bagi perorangan yang belajar mandiri (informal); memberikan peluang bagi pengembangan kreativitas perorangan; merangsang imajinasi serta kreativitas anak dan kaum muda; mempromosikan warisan budaya, penghargaan atas seni, penemuan ilmiah dan inovasi; menyediakan akses pada ekspresi budaya dan semua pertunjukan seni; membina dialog antar budaya dan mendukung keanekaragaman budaya; membantu budaya lisan; menjamin akses atas semua jenis informasi kemasyarakatan bagi semua warga; menyediakan layanan informasi yang layak kepada usaha lokal, asosiasi dan kelompok peminat khusus; memfasilitasi pengembangan keterampilan akan ketidakbutaan informasi; mendukung dan aktif dalam kegiatan pemberantasan buta huruf (program literasi) bagi semua kelompok umur dan bahkan melakukan inisiatif kegiatan apabila diperlukan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pengelolaan harus ada kebijakan yang jelas tentang tujuan, prioritas, serta jenis layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Secara fisik semua warga masyarakat setempat harus dapat mengakses layanan. Ini memerlukan letak dan kondisi perpustakaan yang cocok, fasilitas baca dan belajar yang baik. Demikian juga dengan pilihan teknologi yang sesuai serta waktu layanan yang cukup. Tidak boleh dilupakan adalah layanan lain bagi yang tidak dapat datang ke perpustakaan. Layanan perpustakaan umum harus dapat diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan.

Penjelasan tentang perpustakaan umum (publik) 'sebagaimana harusnya' inilah yang menjadi landasan pemikiran bagi penjelasan konsep selanjutnya.

2.1.2 Unsur Pokok Perpustakaan dalam Pembangunan Perpustakaan

Laura Wendelf (1998) (dalam Arwin Agus, 2006: 10) mengatakan bahwa sebelum mendirikan sebuah perpustakaan, perlu dipertanyakan apakah masyarakat memang benar-benar memerlukan perpustakaan? Sebelum mendirikan sebuah perpustakaan harus dilakukan upaya untuk mengetahui apakah masyarakat memang memerlukan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Oleh karena itu, harus diadakan penyelidikan sumber-sumber informasi yang ada di masyarakat. Lebih lanjut, perlu pula ditanyakan kepada masyarakat pemberi informasi lainnya, seperti masyarakat yang membawa berita dari perkotaan, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian yang sukses, dan sebagainya. Setelah itu ditanyakan kepada masyarakat apakah mereka telah puas dengan informasi tersebut. Apakah mereka masih merasa kurang dan memerlukan sumber lain yang lengkap. Apabila jawabannya sudah merasa cukup dengan informasi yang ada, maka untuk mendirikan perpustakaan perlu dipertimbangkan. Akan tetapi, apabila jawabannya masih kurang, artinya masyarakat tersebut memerlukan perpustakaan.

Selanjutnya, menurut Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI (dalam Sutarno NS, 2006: 78-79), langkah-langkah kegiatan pembentukan sebuah perpustakaan terdiri atas:

1. Menyusun rencana, anggaran, dan program kerja pembangunan yang mencakup: pertama, rencana pelaksanaan pembentukan; kedua,

- pembuatan rencana pelaksanaan dan penyelesaian pengadaan tujuh unsur pokok perpustakaan.
2. Penyelesaian persetujuan dan perijinan.
 3. Pelaksanaan penyelesaian.
 4. Pembuatan kebijakan pengelolaan perpustakaan/pedoman teknis.

Tujuh unsur pokok perpustakaan yang dimaksud Sutarno NS (2006: 79), yaitu:

1. Surat Keputusan Organisasi;
2. Gedung atau ruangan;
3. Koleksi bahan pustaka;
4. Pengadaan perlengkapan dan perabot;
5. Pengadaan sistem atau metode;
6. Pengadaan mata anggaran; dan
7. Pengangkatan Kepala Perpustakaan, pustakawan, dan pegawai yang lain.

Unsur yang ketujuh dapat disederhanakan menjadi “tenaga pustakawan/pelaksana teknis perpustakaan” (Sutarno NS, 2008: 30).

Lebih lanjut, Sutarno NS (2006: 79) mengatakan bahwa “dalam membangun satu perpustakaan baru, berarti mengadakan ketujuh unsur pokok di atas sebagai wujud perpustakaan yang baru pertama kali. Masing-masing unsur tersebut mempunyai kriteria dasar, namun kriteria dasar itu harus disesuaikan dengan tingkat kelembagaan perpustakaan yang bersangkutan.”

Di bawah ini dijelaskan masing-masing unsur perpustakaan tersebut di atas (Sutarno NS, 2008: 31-33):

1. Organisasi perpustakaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pihak yang berwenang agar organisasi itu sah dan resmi. Keputusan itu berisi pertimbangan, tugas, masyarakat yang harus dilayani, syarat kepala perpustakaan, tanggung jawab dan kewenangan, bagan struktur organisasi, beban mata anggaran kewajiban membuat laporan. Keputusan itu juga menjadi sumber pengadaan tenaga pustakawan, pembuatan rencana dan program serta penjabaran kerja, dan lain-lain. Pengadaan anggaran menurut sumber kekuatan legal/formal dan pertanggungjawaban kepada pejabat yang berwenang.
2. Gedung/ruangan
Aspek yang perlu diperhatikan adalah:
 - (a) Lokasi, strategis, mudah dijangkau;
 - (b) Ekonomis;
 - (c) Ditangani masyarakat setempat;
 - (d) Luas tanah yang cukup untuk pengembangan 10-15 tahun ke depan;

- (e) Luas gedung/ruang untuk menampung koleksi;
 - (f) Ruang pembaca dan ruang layanan;
 - (g) Ruang pengolahan, administrasi, dan ruang lain, dengan konstruksi yang kuat dan aman.
 - (h) Cahaya, sirkulasi udara, kesejukan, ketenangan dan halaman/lahan parkir atau taman.
3. Koleksi bahan pustaka
- Koleksi perpustakaan mencakup:
- (a) Tertulis;
 - (b) Tercetak seperti buku, majalah, koran;
 - (c) Terekam dan audio visual.
- Koleksi tersebut mencakup pembentukan koleksi pertama dan pembinaan dan pengembangan.
- Koleksi dikelompokkan ke dalam:
- (a) Anak-anak;
 - (b) Remaja;
 - (c) Pemuda;
 - (d) Dewasa;
 - (e) Pandang dengar (audio visual – AV);
 - (f) Rujukan;
 - (g) Majalah/Koran dan sejenisnya;
 - (h) Terbitan berkala;
 - (i) Koleksi berhuruf braille untuk penyandang tunanetra.
4. Perlengkapan dan perabot adalah semua peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan perpustakaan dan melayani masyarakat.
5. Sistem/metode pengolahan dengan menggunakan buku-buku panduan standar dari Perpustakaan Nasional RI dan sistem layanan terbuka.
6. Mata anggaran adalah bersumber dari dana pemerintah desa, pemerintah daerah, dan sumbangan yang tidak mengikat.
7. Tenaga perpustakaan adalah petugas harian yang mengelola perpustakaan, mengolah koleksi, dan melayani masyarakat.

Lebih sederhana dari pemaparan di atas, Arwin Agus (2006: 14-15) memaparkan kriteria perpustakaan pemukiman sebagai berikut:

1. Pengelola perpustakaan terdiri atas 1 orang penanggungjawab dan 2 orang tenaga pengelola.
2. Koleksi bahan pustaka minimal 250 eksemplar.
3. Sarana dan prasarana terdiri atas ruangan perpustakaan minimal 3x4 meter persegi (dengan membuat surat pernyataan dari Lurah atau Sekretaris Lurah); dan perlengkapan yang terdiri atas rak majalah serta rak buku dengan jumlah minimal masing-masing buah.

2.1.3 Pembangunan Perpustakaan Masyarakat Dalam Kerangka Pembangunan Masyarakat

Berpijak pada manifesto perpustakaan umum, pembangunan perpustakaan umum ataupun perpustakaan masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari upaya pembangunan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan perpustakaan masyarakat dilaksanakan dalam kerangka pembangunan masyarakat.

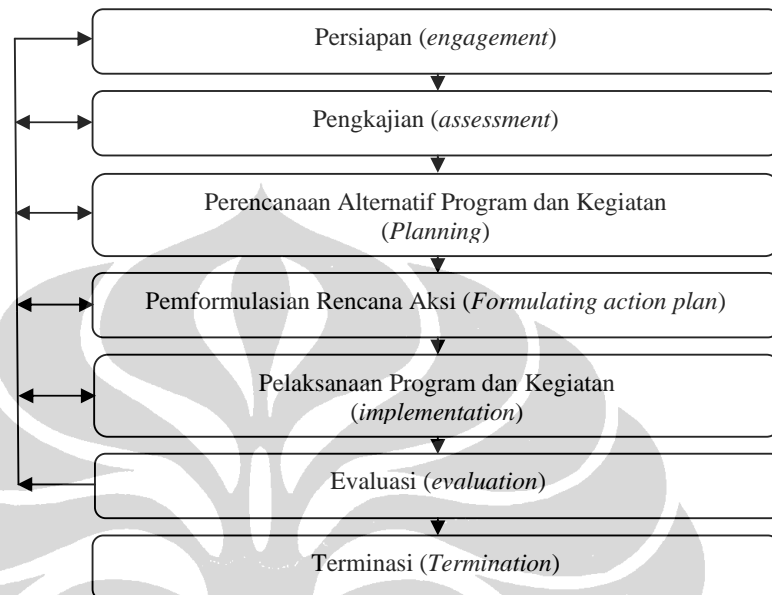
David C. Korten (1993: 110) menjelaskan tentang makna pembangunan sebagai proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri (Abraham Badu, 2003: 34).

Zen (dalam Forum Inovasi Vol.11, 2002: 15) mengungkapkan bahwa pembangunan atau pengembangan dalam arti *development* bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki oleh masyarakat suatu wilayah, tetapi pembangunan atau pengembangan harus diartikan sebagai keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuan untuk merealisasikannya (Abraham Badu, 2003).

Selanjutnya, Keraf (dalam Susanto, 2003: 182) sebagaimana dikutip oleh Abraham Badu (2003: 37) mengatakan bahwa ada tiga prinsip utama menuju keberhasilan pembangunan berkelanjutan, yaitu: pertama, prinsip demokrasi, prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat. Kedua, prinsip keadilan, prinsip ini menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil pembangunan. Ketiga, prinsip berkelanjutan, prinsip ini mengharuskan kita untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner, melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek.

Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas pada dasarnya selaras dengan manifesto perpustakaan umum yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya.

Adapun tahap-tahap pembangunan atau pengembangan masyarakat yang diuraikan oleh Isbandi Rukminto Adi (2007) adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Tahap Pembangunan/Pengembangan Masyarakat

(Sumber: Isbandi Rukminto Adi, 2007: 32)

Dalam skema tahap pembangunan/pengembangan masyarakat itu, tanda panah ke bawah menandakan tahapan yang disusun secara sistematis, namun tidak selalu harus dilalui secara satu per satu. Tanda panah di sisi kiri menandakan bahwa pada setiap proses bisa terus kembali ke satu tahap sebelumnya apabila dirasa masih kurang atau perlu perbaikan. Hal ini dikarenakan dalam setiap tahap kemungkinan akan menghadapi kendala dan kekurangan atas apa yang telah ditetapkan dari tahap sebelumnya dan kekurangan itu mesti diperbaiki demi keberlangsungan dan keberhasilan program pembangunan. Skema tersebut lebih merupakan siklus dalam pembangunan masyarakat sampai pada titik terminasi.

Tahap persiapan (*engagement*), pengkajian (*assessment*), perencanaan alternatif program dan kegiatan (*planning*), pemformulasian rencana aksi (*formulating action plan*) merupakan proses perencanaan secara menyeluruh. Pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif

untuk mencapai tujuan tertentu (Waterston dalam Conyers, 1991: 26). Apapun yang terlintas dalam benak kita manakala membicarakan perencanaan kiranya tidak terlepas dari kaitan persoalan pengambilan keputusan. Implikasinya adalah bahwa pasti ada cara yang lebih baik dalam hal pengambilan keputusan tersebut, mungkin dengan cara yang lebih memperhatikan banyak data yang ada, ataupun hasil-hasil yang mungkin dicapai di masa yang akan datang (Schaffer dalam Conyers, 1991: 29).

Suatu perencanaan program sosial dianggap efektif apabila perencanaan tersebut mampu memenuhi tuntutan kebutuhan (*need assessment*) kelompok sasaran (Kettner, Moroney, dan Martin, 1991: 57). Dari pernyataan itu, masalah-masalah yang ada harus diperhatikan agar pengambilan keputusan mengenai perencanaan pembangunan perpustakaan masyarakat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Isbandi (2007: 70-71) mengungkapkan bahwa konsep kebutuhan menjadi salah satu unsur penting karena secara teoritis suatu *human service organization* haruslah memperhatikan usulan dari komunitas sasaran agar dapat memberikan layanan yang tepat dan dibutuhkan. Karenanya pula dalam proses *assessment* tim perencana partisipatoris harus dapat melihat dan membantu masyarakat untuk mengenali secara lebih 'tepat' manakah yang sebenarnya lebih penting untuk untuk komunitas tersebut. Cara yang terbaik adalah dengan melakukan diskusi sehingga terjadi proses penentuan prioritas masalah oleh masyarakat berdasarkan perkembangan pengetahuan dan kesadaran mereka sendiri, sehingga bukan karena 'paksaan' atau instruksi dari agen perubahan (*change agent*). Artinya, dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan pembangunan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat.

2.2 Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian dan Prinsip Partisipasi Masyarakat

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan

orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing definisi belum saling melengkapi. Peneliti membuat kesimpulan dari definisi yang diungkapkan oleh ketiga pakar tersebut bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Untuk lebih mudah dalam melihat dan memahami mengenai tiga pengertian partisipasi menurut beberapa pakar yang telah diuraikan di atas dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pemikiran Tentang Pengertian Partisipasi

Nama Pakar	Pemikiran Tentang Pengertian Partisipasi
Ach. Wazir Ws., <i>et al.</i> (1999: 29)	Keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.
Isbandi Rukminto Adi (2007: 27)	Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Mikkelsen (1999: 64)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 2. “Pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; 3. Keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; 4. Suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; 5. Pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; 6. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- (a) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- (b) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- (c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- (d) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- (e) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- (f) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- (g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

2.2.2 Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi

sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi dan beberapa ahli yang mengungkapkannya dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi

Nama Pakar	Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi
(Hamijoyo, 2007: 21; Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
(Hamijoyo, 2007: 21; Holil, 1980: 81 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara

memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan *self mobilization*. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tipe Partisipasi

No.	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/ manipulatif	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; (b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; (c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; (b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; (c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3.	Partisipasi melalui konsultasi	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; (b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; (c) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; (d) Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4.	Partisipasi untuk insentif materil	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; (b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; (c) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk

		melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
5.	Partisipasi fungsional	<ul style="list-style-type: none"> (a) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; (b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; (c) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
6.	Partisipasi interaktif	<ul style="list-style-type: none"> (a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; (b) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; (c) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
7.	<i>Self mobilization</i>	<ul style="list-style-type: none"> (a) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; (b) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; (c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Sumber: Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33)

Terkait dengan penerapan metode kaji tindak partisipatif dalam penelitian yang akan dilakukan, partisipasi merupakan kunci pokok kegiatan kaji tindak partisipatif. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa suatu kaji tindak akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya,

sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

Tipe partisipasi yang sesuai dengan kaji tindak partisipatif adalah partisipasi interaktif (*interactive participation*), dimana masyarakat berpartisipasi dalam menganalisis situasi melalui aksi bersama (*collective action*) dengan metode inter-disiplin dan proses pembelajaran secara terstruktur. Implementasinya, masyarakat dapat mengawasi keputusan lokal dan memiliki keterkaitan dalam menjaga serta sekaligus memperbaiki struktur dan kegiatan yang dilakukan (Muhammad Iqbal, Edi Basuno, dan Gelar Satya Budhi, 2007: 80-81), khususnya dalam upaya pembangunan dan pendayagunaan perpustakaan.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran

perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
6. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan

umum yang semu karena penunggangannya oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;

7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

2.3 Masyarakat

Pengertian masyarakat dalam penelitian ini mengikuti batasan pengertian masyarakat lokal atau komunitas lokal (*local community*) dengan berbagai aset yang dimilikinya. Aset yang dimiliki masyarakat dilihat sebagai modal dasar masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan perpustakaan masyarakat.

Kenneth Wilkinson (1991) dalam Green dan Haines (2002: 4) (dalam Isbandi, 2007: 5-6) melihat komunitas sekurang-kurangnya mempunyai 3 (tiga) unsur dasar, yaitu:

- (a) Adanya batasan wilayah atau tempat (*territory or place*);
- (b) Merupakan suatu ‘organisasi sosial’ atau institusi sosial yang menyediakan kesempatan untuk para warganya agar dapat melakukan interaksi antar warga secara reguler; dan
- (c) Interaksi sosial yang dilakukan terjadi karena ada minat ataupun kepentingan yang sama (*common interest*).

Setidaknya, 3 (tiga) unsur dasar itulah yang digunakan untuk membatasi pengertian masyarakat lokal dalam pengertian ini. Masyarakat tidak dipandang sebagai kumpulan individu-individu semata melainkan sebagai suatu sistem yang terwujud dari hubungan-hubungan atau kehidupan bersama manusia (anggota-anggotanya). Komunitas di tingkat lokal, menurut Isbandi (2007: 35), “dalam perjalanan waktu telah mengembangkan suatu aset yang menjadi sumber daya bagi komunitas tersebut guna menghadapi perubahan yang terjadi selama ini.” Selanjutnya, Isbandi (2007: 65) menguraikan secara singkat aset komunitas yang mewakili berbagai aset utama dalam pembangunan, meskipun mungkin bukan keseluruhan aset yang ada, sebagai berikut:

- (1) modal manusia mewakili unsur pengetahuan, perspektif, mentalitas, keahlian, pendidikan, kemampuan kerja dan kesehatan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; (2) modal fisik mewakili unsur bangunan (seperti: perumahan, pasar, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya) dan infrastruktur dasar (seperti: jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan telepon, dan sebagainya) yang merupakan sarana yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya; (3) modal finansial atau modal keuangan mewakili sumber-sumber keuangan yang ada di masyarakat (seperti: penghasilan, tabungan, pendanaan reguler, pinjaman modal usaha, sertifikat surat berharga, saham, dan sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang derajat kehidupan masyarakat; (4) modal sosial mewakili sumber daya sosial (seperti jaringan sosial, kepercayaan masyarakat, ikatan sosial, dan sebagainya) yang bermanfaat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya; (5) modal lingkungan mewakili sumber daya alam dan sumber daya hayati yang melingkupi suatu masyarakat; dan (6) modal teknologi mewakili sistem ataupun piranti lunak (*software*) yang melengkapi modal fisik (seperti teknologi pengairan sawah, teknologi penyaringan air, teknologi pangan, teknologi cetak jarak jauh dan berbagai teknologi lainnya) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam penjelasannya ke enam aset

komunitas itu dijelaskan secara terpisah, akan tetapi pada hakikatnya mereka bisa saling terkait satu dengan lainnya.

Pengertian konseptual mengenai masyarakat beserta asetnya ini menjadi batasan yang digunakan untuk mengenal dan menggambarkan masyarakat di dalam konteks kaji tindak partisipatif pembangunan perpustakaan masyarakat yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat Kampung Gunung Batu Desa Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Jawa Barat.

2.4 Alur Pikir Penelitian

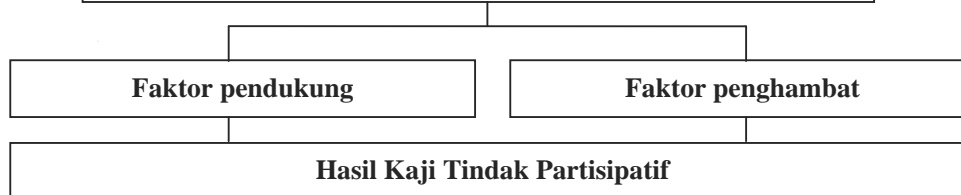
1. Perpustakaan masyarakat yang selalu dikatakan berorientasi pada pemakai (yaitu masyarakat), berdasarkan fungsi dan tujuannya memiliki peran dalam upaya pembangunan masyarakat.
2. Pembangunan perpustakaan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuannya (yang selaras dengan tujuan pembangunan masyarakat) sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat di sekitarnya.
3. Pemahaman yang baik atas keberadaan perpustakaan perlu dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di sekitarnya agar perpustakaan benar-benar dirasakan sebagai milik masyarakat. Dengan demikian partisipasi masyarakat benar-benar diperlukan adanya.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan perpustakaan masyarakat:

1. Definisi partisipasi masyarakat.
2. Prinsip partisipasi masyarakat.
3. Bentuk dan tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan perpustakaan masyarakat yang diinginkan.
4. Proses munculnya partisipasi masyarakat.
5. Proses pengembangan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan Kaji Tindak Partisipatif

1. Perencanaan pembangunan perpustakaan masyarakat dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
2. Pelaksanaan pembangunan perpustakaan masyarakat dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.



Gambar 2.2. Alur Pikir Penelitian